



**SEKRETARIAT
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Etik Retno Wiyati
Jabatan : Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Asnawi Abdullah
Jabatan : Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Asnawi Abdullah

Jakarta, Januari 2026

Pihak Pertama,



Etik Retno Wiyati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Tujuan 4: Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan yang efektif, adil, dan berkelanjutan	IT 4	Rasio belanja kesehatan per kapita terhadap usia harapan hidup sehat**
	Sasaran Strategis 4.1 Meningkatnya kualitas tata kelola dan pembiayaan kesehatan di pusat dan daerah	ISS 26	Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang menyelaraskan Perencanaan Pembangunan dan mencapai target Tahunan Pembangunan**
	024.D1 Program Sumber Daya Kesehatan		
	Sasaran Program: Meningkatnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah	IKP 26.2	Persentase daerah yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional**
		IKP 26.4	Nilai kualitas kebijakan Kementerian Kesehatan**
	7969. Kegiatan Perumusan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pengelolaan integrasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan kesehatan	IKK 26.2.1	Persentase provinsi yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional
		IKM 26.4.5	Nilai kebijakan yang menjadi obyek pengukuran nilai kualitas kebijakan Kementerian Kesehatan
			30%
			91,69 (Nilai)

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
II	Tujuan 6: Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien	IT 6 Nilai <i>Good Public Governance</i> Kementerian Kesehatan**	
	Sasaran Strategis 6.1 Meningkatkan kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan	ISS 33 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan**	
	024.WA Program Dukungan Manajemen		
	Sasaran Program: Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan	IKP 33.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkes**	
		IKP 33.2 Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan**	
		IKP 33.3 Indeks Penerapan Sistem Merit Kemenkes**	
		IKP 33.4 Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT)**	
	6797. Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	IKK 33.1.7 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	82 (Nilai)
		IKK 33.2.7 Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	92,75 (Nilai)
IKK 33.3.7 Indeks Kualitas SDM Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		84,6 (Nilai)	

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		IKK 33.4.16 Nilai Maturitas Manajemen Risiko Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	4 (Nilai)
		IKK 33.4.24 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	95%
		IKM 33.1.1 Nilai SAKIP Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	83 (Nilai)
		IKM 33.3.1 Indeks Integritas Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	80 (Indeks)
		IKD 33.1a.1 Reviu dan prioritas seluruh regulasi Kemenkes (sampai SE Eselon I, termasuk yang digabungkan) untuk keluaran Program Legislasi Kesehatan/ <i>Prolegkes</i> selesai pada 14 April 2026	100%
		IKD 33.1c.1 Reviu regulasi untuk penyusunan Prolegkes Tahun 2027 selesai di September 2026	100%
		IKD 33.1.3 Perencanaan Pengembangan Kompetensi Jabatan	100%

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Fungsional Analisis Kebijakan di Kemenkes pada setiap Jenjang selesai pada triwulan I Tahun 2026	
		IKD 33.2.1 Persentase Realisasi Anggaran Unit Kerja	96%

Keterangan:

* : Kontributor (Indikator Kinerja dan Target ditampilkan)

** : Kolaborator (Target Indikator Kinerja tidak ditampilkan)

IKM : Indikator Kinerja Mandatory (di Luar Renstra dan termasuk Ruang Lingkup Tusi)

IKD : Indikator Kinerja Direktif Pimpinan

Kegiatan

Perumusan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Total Anggaran Unit Kerja Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan


Anggaran

Rp. 300.000.000,-

Rp. 18.479.404.000,-

Rp. 18.779.404.000,-

Pihak Kedua,


Asnawi Abdullah

Jakarta, Januari 2026
 Pihak Pertama,


Etik Retno Wiyati